

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

BKD Kabupaten Sukoharjo, BPPKAD Kabupaten Purworejo, dan BPKAD Kota Magelang dalam melaksanakan belanja hibah pilkada TA 2020 memerlukan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dengan jumlah pemilih, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan. Kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dari perhitungan kondisi fiskal daerah dan dari indeks kapasitas fiskal daerah.

Kondisi Fiskal di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang secara umum sudah baik yaitu di atas angka acuan, tetapi mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, pada aspek kemandirian keuangan masih perlu ditingkatkan lagi karena masih dibawah angka acuan yaitu 0,5. Hal ini menandakan ketergantungan ketiga daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari belanja hibah pilkada yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah pusat. Urutan kemandirian fiskal pada tahun 2020 dari yang paling besar ke paling rendah yaitu Kota Magelang (0,252), Kabupaten Sukoharjo (0,15), dan Kabupaten Purworejo (0,137). Kemandirian keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk membiayai belanja hibah pilkada yang ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan. Selain aspek kemandirian

keuangan, aspek solvabilitas anggaran Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Purworejo masih dibawah angka acuan (angka 1). Oleh karena itu, kedua daerah tersebut harus berhati-hati dalam menghadapi defisit operasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai belanja pilkada paling besar. Hal ini terlihat dari total belanja hibah pilkada Kota Magelang yang paling kecil di antara ketiga daerah lainnya.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) di ketiga daerah tersebut tergolong sedang dengan urutan IKFD tertinggi ke terendah yaitu Kabupaten Sukoharjo (1,064), Kabupaten Sukoharjo (0,964), dan Kota Magelang (0,757). IKFD yang rendah menunjukkan bahwa PAD di daerah tersebut masih tergolong rendah, dan sebaliknya. Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan daerah untuk memberikan tambahan dana di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang paling mampu memenuhi kebutuhan instansi/lembaga penerima belanja hibah pilkada.

Variabel kebutuhan fiskal daerah dapat dilihat dari IPM dan PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita dan IPM menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tersebut semakin baik. Pembangunan ekonomi dari tertinggi ke terendah yaitu Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Kota Magelang sangatlah bagus di antara dua daerah lainnya. Hal ini terlihat dari kemandirian keuangan dan pembangunan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut. Meskipun IKFD Kota Magelang paling rendah karena PAD yang dihasilkan Kota Magelang paling kecil. Menimbang luas wilayah Kota Magelang yang paling kecil. Dengan total

kebutuhan belanja hibah pilkada paling kecil dan kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi menunjukkan kemampuan keuangan Kota Magelang dalam membiayai belanja hibah pilkada sangatlah tinggi.

Pemberian Hibah pilkada berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Hal ini terlihat dari semakin banyak belanja hibah pilkada di suatu daerah, maka semakin menurun kemandirian keuangan daerah. Seperti Kabupaten Purworejo, daerah ini memiliki total belanja hibah pilkada tertinggi di antara kedua daerah lainnya, tetapi memiliki kemandirian fiskal paling kecil diantara dua daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo paling rendah kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi belanja hibah pilkada di antara dua daerah lainnya.

4.2 Saran

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa belanja hibah pilkada menyebabkan pengeluaran daerah yang cukup besar sehingga perlu perubahan paradigma bahwa pendanaan pilkada oleh pemerintah daerah akan membebani daerah dan menyebabkan kontra produksi untuk daerah tersebut. Pengurangan pos belanja daerah lainnya selain belanja pilkada yang ditujukan hanya untuk mendanai belanja hibah pilkada. Apabila belanja yang dikurangi tersebut ternyata penting, tentu saja akan mengurangi kualitas pelayanan kantor tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk menjadi *gap* (permasalahan) penelitian berikutnya untuk melihat tingkat kepentingan alokasi pos belanja daerah lainnya untuk daerah .